

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menuju mewujudkan cita-cita menjadi negara maju, dalam mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah Indonesia dan Presiden Joko Widodo memberikan gagasan baru yaitu Indonesia Emas 2045. Pada Tahun 2045 nantinya merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara karena Indonesia akan genap berusia 100 tahun atau satu abad, sehingga gagasan Indonesia Emas 2045 ini sangatlah penting untuk dipersiapkan mulai saat ini. Indonesia diperkirakan akan memperoleh bonus demografi sebesar 70% pada sekitar Tahun 2045. Jargon “Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur” merupakan visi baru bangsa dalam rancangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 (Yacob, 2021).

Dalam mewujudkan impian dan visi Indonesia 2045, empat pilar visi Indonesia 2045 dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat pilar tersebut adalah: (a) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (b) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (c) Pemerataan Pembangunan, dan (d) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan (Nurhanisah et al., 2019). Dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia, SDGs atau *Sustainable Development Goals* merupakan suatu hal yang penting sebagai acuan dalam pembangunan. SDGs atau *Sustainable Development Goals* merupakan upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian, sosial, kualitas lingkungan, serta keadilan dan tata kelola pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat dari setiap generasi (Febriani & Samudra, 2023). Berdasarkan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020, SDGs desa memiliki 18 (delapan belas) tujuan dan 8 (delapan) tipologi desa dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut dapat membantu upaya dalam melaksanakan pilar visi Indonesia 2045.

Dalam mencapai visi misi yang baik, pemerintah tentunya juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapainya. Seperti halnya penerapan teknologi pada perkotaan untuk mendukung masyarakatnya dalam

beraktivitas sehari-hari. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, maka penggunaan serta ketergantungan sumber daya pada perkotaan dapat terkelola dengan baik seiring berkembangnya zaman (Rosalina et al., 2014). Integrasi antar infrastruktur fisik dengan sistem digital serta keterampilan sumber daya manusia yang efektif dengan tujuan mendukung harapan masa depan yang makmur dan berkelanjutan dapat disebut dengan Smart City (Annisah, 2018). Seiring berjalannya waktu pada *Smart City* yang terus berkembang, pada level atau skala di bawah perkotaan yang lebih kecil yaitu perdesaan, konsep dengan sebutan *Smart Village* telah mulai diimplementasikan sebagai bentuk pengembangan desa berbasis teknologi informasi (Herdiana, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu poin pembangunan kawasan yang berada di perdesaan meliputi pembangunan pada infrastruktur desa, peningkatan pada ekonomi desa, serta pengembangan teknologi secara tepat guna. Sehingga penerapan konsep *Smart Village* dapat mendukung pembangunan di kawasan perdesaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Smart village atau desa cerdas memiliki pengertian bahwa desa dibangun dengan memanfaatkan penerapan teknologi. Desa yang sudah menerapkan teknologi secara maksimal dan mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan capaian terobosan baru akan masuk ke dalam kategori desa mandiri (Iskandar H. dalam Damarjati D., 2021). Desa mandiri adalah desa maju yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa ketahanan seperti ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial selama pelaksanaan pembangunan desa secara berkelanjutan (Permendes No.2 Tahun 2016, bab 1, pasal 1, nomor 11). Iskandar H. dalam Damarjati D. (2021) menyatakan bahwa desa yang masuk pada kategori desa mandiri adalah desa yang memiliki tingkat kemandirian lebih dari 75%. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Desa PDTT pada Tahun 2021, didapatkan data bahwa dari 73.850 desa hanya 3278 desa yang masuk pada kategori desa mandiri. Berikut adalah data status Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berdasarkan lima (5) kategori, yaitu:

Tabel I-1 Data Status IDM
(Kemendesa PDTT, 2021)

Kategori Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Mandiri	840 Desa	1741 Desa	3278 Desa
Maju	8647 Desa	11899 Desa	15324 Desa
Berkembang	38185 Desa	39866 Desa	38086 Desa
Tertinggal	17626 Desa	13961 Desa	12177 Desa
Sangat Tertinggal	3536 Desa	2466 Desa	4985 Desa

Dari hasil data di atas, dapat diketahui bahwa desa di Indonesia mengalami peningkatan dalam menjadi desa mandiri, akan tetapi masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal ataupun desa sangat tertinggal. Sehingga masih dibutuhkan peran masyarakat untuk membangun desa supaya menjadi desa mandiri dengan cara salah satunya adalah melalui *smart village*.

Perancangan *Enterprise architecture* merupakan cara yang tepat untuk membantu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui *smart village*. *Enterprise architecture* adalah sebuah alat (*tools*) yang dapat membantu untuk mensinergitaskan dan menyelaraskan antara teknologi informasi dan bisnis organisasi (Cretu, L.G. dalam Thaib & Emanuel, 2020) dan data yang dihasilkan oleh penggunaan *Enterprise architecture* dapat digunakan untuk membantu dan memenuhi tujuan dari organisasi itu sendiri (Polovina & von Rosing, 2018). Sehingga dalam menentukan rencana strategis dan strategi bisnis TI pada tujuan organisasi haruslah saling berdampingan dan sejajar untuk menciptakan organisasi yang baik, efektif, dan efisien (Olsen & Trelsgard, 2016).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, dan integrasi maka dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut (Rizkinaswara, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada pengguna atau *user* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki beberapa prinsip yaitu: (a) efektifitas, (b) keterpaduan, (c) kesinambungan, (d) efisiensi, (e) akuntabilitas, (f) interoperabilitas, dan (g) keamanan (Perpres Nomor 95 Tahun 2018).

Penelitian sebelumnya terhadap implementasi *enterprise architecture* pada pembangunan *smart village* yang dilakukan oleh Ilham Alhari & Nur Fajrillah (2022) mengenai “*Enterprise architecture: A strategy to achieve e-government dimension of Smart Village using Togaf ADM 9.2*” mengangkat pemerintahan desa dengan kategori IDM desa maju yang berada di Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian. Selama penelitian dilakukan ditemukan suatu permasalahan yaitu kurangnya peran Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk merumuskan kebijakan dan langkah pada setiap sektor. Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian masih memerlukan perancangan arsitektur *smart village* dengan tetap memperhatikan aspek transparansi dan kebijakan pada pelayanan publik. *Framework* TOGAF ADM 9.2 dimanfaatkan untuk menghasilkan desain *blueprint* dalam menyelaraskan antara implementasi teknologi informasi dengan kepentingan pemerintah terhadap implementasi *e-government* yang bersinergi dengan aspek SDGs. Penelitian tersebut memberikan hasil berupa rancangan arsitektur *enterprise smart village* pada fungsi dimensi *e-government* dan beberapa artefak berupa matriks, diagram, dan katalog yang dihasilkan dari penggunaan *framework* TOGAF ADM 9.2 pada Kabupaten Sragen.

Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah terkait implementasi *enterprise architecture* dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Syahrini Qotrunnisa et al. (2021) mengenai “Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kuningan” mengangkat Pemerintah Daerah Kuningan sebagai objek

penelitian. Selama penelitian dilakukan didapatkan informasi bahwa Pemerintah Daerah Kuningan masih berada pada kategori predikat indeks SPBE yaitu cukup dan belum memiliki standarisasi layanan pada SPBE. Karena hal tersebut, segi layanan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kuningan masih belum maksimal dan optimal. Perancangan *enterprise architecture* dimanfaatkan selama penelitian tersebut dengan tujuan untuk melakukan optimalisasi terhadap layanan SPBE berdasarkan proses bisnis dan aplikasi yang berhubungan. Penelitian tersebut memberikan hasil solusi berupa katalog layanan administrasi pemerintahan dan matrik bidang/proses bisnis yang mampu meningkatkan mutu pelayanan khususnya internal birokrasi.

Pada penelitian ini, lingkungan pemerintah desa yang berada di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diangkat sebagai objek penelitian dalam upaya meningkatkan pembangunan desa berbasis teknologi di Indonesia dan upaya dalam membantu atau mendukung Kecamatan Baleendah untuk meningkatkan IDM desa yang ada menjadi lebih baik lagi melalui konsep *smart village*. Berdasarkan data nilai SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT pada Kecamatan Baleendah, Desa Rancamanyar memiliki nilai SDGs yang paling rendah di antara tiga desa yang ada dengan nilai total SDGs sebesar 29,65. Berikut merupakan detail data dari setiap tujuan yang ada pada Desa Rancamanyar.

Tabel I-2 Nilai SDGs Desa
(Kemendesa PDTT, 2023)

No.	Tujuan SDGs	Nilai
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	78,78
2.	Desa Tanpa Kelaparan	33,33
3.	Desa Sehat dan Sejahtera	41,19
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	28,90
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	33,33
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	63,93
7.	Desa Bersinergi Bersih dan Terbarukan	99,53
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	22,27
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	0,00
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	27,51
11.	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	32,20
12.	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	0,00
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0,00
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	0,00

No.	Tujuan SDGs	Nilai
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	0,00
16.	Desa Damai Berkeadilan	72,67
17.	Kemitraan Untuk Pembangunan	0,00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	0,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai SDGs yang ada pada Desa Rancamanyar pada tujuan ke-8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata masih berada di angka 22,27. Hal ini menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi yang masih cukup rendah. Dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dimanfaatkan untuk merancang *enterprise architecture* dalam pembentukan desa menjadi *smart village* yang diharapkan dapat membantu atau mendukung upaya desa dalam mempertahankan nilai IDM dan meningkatkan nilai SDGs yang berada di lingkungan Kecamatan Baleendah khususnya pada tujuan ke-8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata melalui tata kelola desa yang baik. Arsitektur SPBE yang ada pada Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan SPBE pada Desa Rancamanyar. Sehingga solusi dari kekurangan yang dihadapi oleh lingkungan pemerintah Desa Rancamanyar diharapkan dapat mampu diselesaikan dengan adanya implementasi *enterprise architecture* SPBE dengan memanfaatkan kerangka kerja TOGAF ADM yang digunakan untuk membantu selama pengimplementasian SPBE. Keluaran atau *output* yang dihasilkan berupa cetak biru (*blue print*) untuk menjadi pedoman dalam pengembangan desa menjadi *smart village* yang dapat menyelaraskan proses bisnis yang dimiliki oleh desa dengan teknologi sehingga memiliki tata kelola desa yang baik.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, didapatkan rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini yaitu bagaimana perancangan *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman pengembangan desa menjadi *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, didapatkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu merancang *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Desa Rancamanyar. Hasil dari rancangan kerja ini berupa dokumen cetak biru (*blue print*) untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan *smart village* pada Desa Rancamanyar.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini yaitu hanya berfokus pada:

1. Perancangan *enterprise architecture* menggunakan kerangka kerja SPBE yang ada pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dengan domain arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, arsitektur keamanan, dan yang terakhir adalah arsitektur layanan.
2. Ruang lingkup serta fokus pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan program RPJM Desa Rancamanyar.
3. Penelitian ini dilakukan sampai tahap perancangan dan tidak dilakukan sampai tahap implementasi.
4. Perancangan *enterprise architecture* pada konsep *smart village* hanya dilakukan pada dimensi *Village Services (Entrepreneurship)* yang ada pada Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah.

I.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman khususnya oleh Desa Rancamanyar untuk membantu dalam mewujudkan visi dan misi yang dimiliki dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan antara proses

bisnis dan teknologi melalui rancangan *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perancangan *smart village*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat oleh penulis tentang pemanfaatan sistem informasi pada lingkungan sekitar dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *smart village*.